

PENDIDIKAN: Upaya Strategis Meningkatkan Peran Wanita

Oleh: Siti Partini Suardiman

Pendahuluan

Tahun 1975 oleh Majelis Umum Peserikatan Bangsa-bangsa ditetapkan sebagai Tahun Wanita Internasional dan dijadikan tahun untuk meningkatkan usaha memajukan persamaan hak antara pria dan wanita, serta memajukan peranserta wanita dalam segala bidang kegiatan. Di tahun itu pula diadakan Konperensi Wanita Se Dunia 1975 yang mencanangkan temanya: *Equity, Development and Peace*.

Di Indonesia hasil konperensi Wanita Se Dunia 1975 sangat dirasakan dan memiliki arti penting bagi sejarah perkembangan wanita Indonesia selanjutnya. Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah bagi wanita Indonesia, karena sejak saat itu kedudukan dan peran wanita secara spesifik dan eksplisit memperoleh pengakuan konsitusional dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1978 yang mengatur kedudukan dan peran wanita semakin mantap. Secara tegas di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor II tahun 1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan bahwa: Wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insani bagi pembangunan, mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segenap kegiatan pembangunan. Bahkan dalam salah satu "logi" dari Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan, disebut-sebut pemerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bagi wanita.

Semua niat baik untuk meningkatkan peran wanita tersebut ternyata tidak semudah seperti yang diharapkan. Kendala utama yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat pendidikan wanita yang bersumber dari pandangan masyarakat masa lalu tentang tidak perlunya pendidikan bagi anak gadisnya. Kini ketertinggalan pendidikan wanita dibanding dengan pria secara berangsur-angsur diupayakan untuk diperbaiki. Pendidikan tetap memegang kunci untuk meningkatkan perannya baik dalam keluarga maupun dalam pembangunan pada umumnya.

Latar Belakang Pendidikan Wanita

Di Indonesia berbagai bentuk kepedulian terhadap wanita diciptakan guna merealisasikan apa yang tertuang dalam GBHN. Kepedulian ini terasa tepat mengingat jumlah penduduk wanita

Indonesia yang cukup besar yaitu 89.873.406 atau 50,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 179.321.641 (Menteri Urusan Peranan Wanita, 1991). Bahkan upaya untuk meningkatkan kedudukan wanita dalam masyarakat dan peranannya dalam pembangunan merupakan gerakan yang mendunia (global). Gerakan semacam ini merupakan gerakan yang wajar mengingat selama ini peran dan kedudukan wanita ditempatkan pada posisi yang rendah. Seperti dikemukakan oleh Benholdt-Thomsen (Nasikun, 1990) bahwa posisi sosial wanita menyerupai posisi kasta bawah di dalam masyarakat dengan sistem kasta, yang pilihan-pilihan lapangan kerjanya seakan-akan telah ditetapkan oleh "suratan tangan" melalui kelahiran. Di mana-mana, sebagaimana halnya dengan kasta bawah di dalam masyarakat dengan sistem kasta, kaum wanita agaknya memang dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih terbatas jumlahnya, memiliki status yang rendah, dan oleh karena itu memperoleh imbalan yang rendah. Keadaan ini bersumber dari latar belakang pendidikan mereka yang rendah.

Meskipun pemerintah telah menetapkan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, namun kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan warganya tidak selamanya dinikmati oleh semua warganya. Ada sekelompok penduduk yang kurang memperoleh keuntungan yaitu wanita. Hal ini disebabkan karena anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa wanita diharapkan untuk tidak bekerja, yang penting bagi wanita adalah kepandaian mengurus rumah tangga, sehingga kurang mendorong keluarga untuk membekali pendidikan bagi anak gadisnya. Di samping itu di masyarakat tradisional, rendahnya rata-rata umur kawin yang pertama menyebabkan mereka tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kurangnya pendidikan bagi wanita menyebabkan terbatasnya kesempatan memasuki angkatan kerja dan akhirnya keterbatasan pendidikan wanita adalah sesuatu yang dapat diterima menurut akal dan dikukuhkan oleh masyarakat.

Kendati tingkat pendidikan penduduk meningkat selama duapuluh tahun ini, tetapi masih tetap ada perbedaan yang mencolok antara pria dan wanita. Perbedaan tingkat pendidikan antara

pria dan wanita berusia 10 tahun ke atas secara berangsur-angsur mulai berkurang sejak tahun 1980, meski untuk setiap jenjang pendidikan tetap masih menunjukkan ketimpangan (Pem. RI-UNICEF, 1989). Meningkatnya pendidikan wanita ini dimungkinkan, dengan makin terbukanya kesempatan wanita untuk mendapatkan kesempatan pendidikan bersama kaum laki-laki. Perbedaan tingkat pendidikan antara wanita dan pria dari tahun ke tahun secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 1.

Tetapi lebih dari 40 persen dari pekerja wanita merupakan pekerja keluarga, yaitu pekerja yang tidak memperoleh gaji atau, dibandingkan dengan 13 persen bagi pekerja pria. Lebih setengah dari keseluruhan pekerja wanita bekerja "tidak penuh" yaitu kurang dari 35 jam seminggu, dibandingkan dengan sepertiga bagi pria.

Tabel 1
Persentase penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin

Pend. Tertinggi yang ditamatkan	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki dan Perempuan		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990	1971	1980	1990
Td/Blm Pernah sekolah	29,3	18,9	10,6	50,9	35,9	21,8	40,4	27,5	16,3
Td/Blm Tamat SD	37,6	43,9*)	31,8	29,1	38,2*)	31,1	33,2	41,0*)	31,5
Se. Dasar	24,0	29,6	35,6	15,4	28,7	37,0	19,6	29,2	36,2
S L P	5,7	9,0	13,5	3,2	7,4	12,0	4,4	8,3	12,8
S L A	2,8	7,1	13,1	1,3	4,6	9,8	2,0	5,9	11,6
Dipl I/II *)	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3
Akademi	0,3	0,6	0,7	0,1	0,2	0,5	0,2	0,4	0,6
Universitas	0,3	0,4	1,2	0,1	0,1	0,6	0,2	0,3	0,9
Tak terjawab	-	0,1	0,0	-	0,1	0,0	-	0,1	0,0
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*) Dalam SP80, Taman Kanak-Kanak termasuk dalam kategori belum tamat SD

***) Dalam SP71 dan SP90 tidak ada rinciannya

Sumber: Biro Pusat Statistik, Ringkasan Hasil Sensus Penduduk 1990

Tingkat pendidikan pada umumnya berkaitan dengan tingkat partisipasinya dalam angkatan kerja. Mengenai tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja (TPAK wanita) telah menunjukkan kenaikan dari 32,4 persen pada tahun 1980 menjadi 37,6 persen pada tahun 1985, suatu peningkatan lebih dari 5 persen. Dalam kurun waktu yang sama, TPAK pria telah meningkat pula, yaitu dari sedikit di atas 67 persen menjadi 68,9 persen, yang berarti kenaikan persentase sebesar hanya sepertiga dari kenaikan wanita.

Peran Pendidikan bagi Status Wanita

Pada hakekatnya tujuan pendidikan adalah mendewasakan seseorang. Kedewasaan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mandiri. Semakin tinggi pendidikan seseorang diharapkan diikuti oleh semakin tingginya tingkat kemandirian seseorang. Pendidikan juga akan memberikan kemampuan kepada seseorang berfikir rasional dan objektif dalam menghadapi masalah. Pendidikan juga merupakan unsur modernisasi yang

menuju kepada terciptanya suatu cara berfikir rasional dan gaya hidup yang mendorong diaplikasikannya teknologi modern.

Bagi wanita pendidikan membantu tidak saja membebaskan diri dari anggapan bahwa wanita adalah makhluk inferior tetapi juga membebaskan diri dari ketidak mampuannya untuk menyatakan dirinya. Dalam keluarga wanita yang berpendidikan berpeluang untuk membuat keputusan. Di samping itu pendidikan memberi kepada wanita kekuatan dan kepercayaan diri untuk mengambil keputusan atas tanggung jawab wanita itu sendiri. Sadli (1991) menyatakan bahwa secara psikologis manusia yang dewasa dan matang harus menjadi pribadi yang mandiri. Wanita yang tergantung dengan demikian adalah pribadi yang tidak matang. Kemandirian memang tidak datang dengan sendirinya. Sosialisasi dan pendidikan yang betul diperlukan untuk menjadikan seseorang mandiri.

liki tingkat pendidikan tinggi cenderung meningkatkan penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan ini berkaitan dengan imbalan yang akan mereka terima. Salah satu sebab rendahnya status kerja maupun rendahnya upah wanita berkaitan dengan kurangnya keterampilan dan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan untuk pekerjaan yang lebih baik. Tepat apa yang dikatakan Boserup (1970) bahwa pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian seorang wanita. Hal ini akan meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan permintaan terhadap jasa-jasanya di pasar tenaga kerja. Di samping itu pendidikan juga meningkatkan aspirasi dan harapan seorang wanita akan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, dan hal ini lebih mendorongnya untuk masuk ke dalam angkatan kerja (Standing, 1976). Sebagai ilustrasi disajikan data persentase pegawai negeri wanita pada tabel 2

Tabel 2
Persentase Pegawai Negeri Menurut jenis Kelamin dan Golongan 1974 - 1984

Golongan	Seluruh Pegawai Negeri				Pegawai Negeri Wanita	
	1974		1984		1974	1984
	Wanita	Pria	Wanita	Pria		
I (terendah)	12,8	87,2	12,0	88,0	38,0	11,8
II	25,7	74,3	35,0	65,0	59,0	82,0
III	12,4	87,6	19,5	80,5	2,9	6,0
IV	5,8	94,2	8,9	91,1	0,1	0,2
T o t a l	18,1	81,9	27,3	72,7	100,0	100,0

Sumber : Pem. RI-UNICEF, hal. 69

Smock (1981) dalam studinya mengajukan tiga hipotesis bahwa meningkatnya pendidikan wanita akan meningkatkan:

1. Tingkat aspirasi dalam angkatan kerja
2. Kemampuan wanita untuk memasuki sektor modern atau pekerjaan yang memberikan upah
3. Terwakilinya wanita dalam kualifikasi pekerjaan yang lebih luas khususnya di dalam kelompok profesional dan teknikal.

Dari ketiga hipotesis itu akhirnya diketahui bahwa hipotesis yang pertama tidak memperlihatkan hubungan yang itu tampak dalam bentuk *curvilinear* daripada *linier*

Dalam hal bekerja, tingkat pendidikan bagi wanita berhubungan dengan penawaran dan permintaan tenaga kerjanya. Wanita yang memi-

Peran Pendidikan Non Formal

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan warganya terus-menerus dilakukan. Salah satu peningkatan yang paling mengesankan dimulai periode awal tahun 1970an sampai tahun 1990an ialah kemajuan dalam tingkat pendidikan yang dicapai di kalangan penduduk usia 10 tahun ke atas. Pada tahun 1971, sebanyak 40,4 persen anak usia sekolah dan orang dewasa tercatat tidak pernah sekolah, pada tahun 1980 persentase golongan penduduk yang tidak pernah bersekolah telah berkurang menjadi 27,5 persen dan pada tahun 1990 tinggal 16,3 persen (tabel1)

Sejalan dengan itu, jumlah mereka yang buta aksara secara berangsur-angsur telah berkurang, terlihat pada persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis berturut-turut pada tahun 1971 sebesar 60,9 persen, pada tahun 1980 sebesar 71,1 persen dan pada tahun 1990 sebesar 84,0 persen. Melihat kenyataan tersebut tampaknya hubungan antara buta huruf dan tidak sekolah sangat erat. Meningkatnya jumlah penduduk yang dapat berbahasa Indonesia tercatat pada tahun 1980 sebesar 60,8 persen dan pada tahun 1990 meningkat menjadi 82,8 persen (BPS, 1990). Kalau dilihat dari segi penurunan persentase, tampaknya penurunan yang terjadi pada penduduk wanita sedikit lebih besar. Penurunan ini tampaknya belum banyak berarti bagi wanita dalam mengejar ketinggalannya dibanding kaum laki-laki. Besarnya angka buta huruf pada penduduk wanita diduga karena masih besarnya jumlah mereka yang tidak pernah sekolah sama sekali.

Pada tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pendidikan kaum laki-laki memang lebih tinggi dibanding kaum wanita. Proporsi penduduk yang tamat pendidikan dasar, menengah dan tinggi telah meningkat pula. Bila diperhatikan peningkatan pendidikan yang dialami oleh wanita lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria, baik untuk tingkat Pendidikan Dasar, Menengah maupun Tinggi. Walaupun tingkat pendidikan laki-laki masih jauh lebih tinggi dari wanita, tetapi kenaikan persentasenya ternyata justru lebih tinggi pada wanita dibanding pada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita tertinggal di bidang pendidikan tetapi lambat atau cepat tanda-tanda untuk mengejar ketinggalannya mulai tampak.

Kemajuan-kemajuan dalam tingkat pendidikan dan melek aksara tersebut merupakan hasil upaya besar-besaran dari pemerintah bersama masyarakat selama lebih dari 20 tahun terakhir. Meningkatnya angka melek aksara (melek huruf) berkat perluasan program pendidikan non formal yang bertujuan:

- a. memberantas tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar)
- b. menyelenggarakan berbagai pendidikan keterampilan untuk mencari nafkah

Sasaran utama program pendidikan non formal adalah mereka yang oleh karena satu dan lain hal tidak pernah bersekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan dasar. Kepada mereka diberikan kegiatan kelompok belajar (Kejar), terutama Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

Dalam Repelita II dan III (1974/75-1978/79 dan 1979/80-1983/84), masing-masing 1,2 juta dan 5,6 juta peserta telah mengikuti berbagai kelompok belajar. Dalam empat tahun pertama Repelita IV (1984/85-1987/88) program pendidikan non formal telah melibatkan 8,6 peserta (Pem.RI - UNICEF, 1989).

Melihat latar belakang pendidikan wanita yang rendah dan banyaknya mereka yang tidak pernah sekolah kiranya pendidikan non formal merupakan upaya tepat untuk meningkatkan peranannya. Kejar usaha merupakan upaya untuk meningkatkan peran wanita dalam meningkatkan pendapatan, yang saat ini sedang memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Bahkan dari penelitian yang sedang penulis lakukan, ada petunjuk bahwa sumbangan pendidikan non formal terhadap pendapatan wanita kepala rumah tangga lebih besar dibanding pendidikan formal yang mereka peroleh. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa pendidikan formal yang mereka terima sudah terlalu lama dan kurang digunakan, sedangkan pendidikan non formal, khususnya Kejar Usaha lebih bersifat aktual, menyentuh ke masa kini, dibutuhkan dan sangat dirasakan manfaatnya.

---oOo---

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Pusat Statistik, tt. *Ringkasan hasil Sensus Penduduk 1990*, Jakarta.
- Boserup, Ester., 1970. *Women's Role in Economic Development*. St. Martin Press. New York.
- Menteri Urusan Peranan Wanita. 1991. *A Brief Situation Analyses of Women*. Jakarta.
- Nasikun. 1990. *Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan: Beberapa Teori dan Implikasi Kebijaksanaan*. Makalah dalam Seminar nasional tentang Peranan Wanita dalam Pembangunan: Antara Harapan dan Realitas. Pusat Penelitian Kependudukan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Pemerintah RI-UNICEF. 1989. *Rangkuman Analisis Situasi Anak dan Wanita di Indonesia*. Jakarta.

Sadli, Saparinah. 1991. Kemadirian Perempuan: Tinjauan Psikologis. Dalam Kelompok Studi Wanita: *Kemandirian Perempuan Indonesia*. Pusat Penelitian Universitas Brawijaya. Malang. p. 28-39.

Smock, Audrey Chapman. *Women's Education in Developing Countries; Opportunities and Outcomes*. Praeger Special Studies. Praeger Scientific. New York.

Standing, Guy. 1976. *Labour Force Participation and Development*. ILO. Geneva.

---oOo---